

Kompleksitas Konflik Thailand-Kamboja atas Kuil Preah Vihear: Peran ASEAN dalam Stabilitas Kawasan

Sultan Baariq Hafizh ^{*1}
Wishnu Mahendra Wiswayana ²

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya

*e-mail: Sultanbaariqhafizh@gmail.com¹, wishnu.mahendra@ub.ac.id²

Abstrak

Konflik Thailand-Kamboja terkait sengketa Kuil Preah Vihear mencerminkan kompleksitas permasalahan keamanan kawasan Asia Tenggara yang berakar pada sejarah kolonial, identitas nasional, dan dinamika politik domestik. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) telah menetapkan kuil berada di bawah kedaulatan Kamboja sejak 1962, ketidakjelasan batas wilayah memicu klaim tumpang tindih yang berulang hingga bentrokan militer pada periode 2008–2011. Penelitian ini menganalisis dinamika konflik tersebut melalui perspektif keamanan kawasan dan diplomasi regional ASEAN. Temuan menunjukkan bahwa sengketa ini berdampak signifikan terhadap stabilitas kawasan, baik dari sisi keamanan militer maupun ekonomi, termasuk perdagangan lintas batas dan investasi. Dalam konteks diplomasi regional, ASEAN memainkan peran sebagai mediator dengan mengedepankan prinsip ASEAN Way yang menekankan musyawarah, konsensus, dan non-intervensi. Melalui pertemuan bilateral, trilateral, dan forum menteri luar negeri, ASEAN berupaya meredakan eskalasi serta menjaga stabilitas kawasan. Namun, keterbatasan mekanisme formal ASEAN menegaskan perlunya penguatan instrumen penyelesaian sengketa yang lebih mengikat. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa konflik bilateral di Asia Tenggara dapat berkembang menjadi ancaman regional, sehingga memerlukan koordinasi diplomasi kolektif yang lebih efektif.

Kata kunci: Thailand, Kamboja, Kuil Preah Vihear, keamanan kawasan, ASEAN Way, diplomasi regional

Abstract

The Thailand-Cambodia conflict over the Preah Vihear Temple reflects the complexity of Southeast Asian regional security issues rooted in colonial history, national identity, and domestic political dynamics. Although the International Court of Justice (ICJ) ruled in 1962 that the temple lies under Cambodia's sovereignty, the ambiguity of the border has led to repeated overlapping claims, resulting in military clashes from 2008 to 2011. This study analyzes the dynamics of the conflict through the lens of regional security and ASEAN's diplomatic efforts. The findings indicate that the dispute significantly impacts regional stability, both militarily and economically, affecting cross-border trade and investment. In the context of regional diplomacy, ASEAN plays a mediating role, emphasizing the ASEAN Way, which focuses on consultation, consensus, and non-interference. Through bilateral, trilateral meetings, and foreign ministers' forums, ASEAN strives to de-escalate tensions and maintain regional stability. However, the limitations of ASEAN's formal mechanisms highlight the need to strengthen more binding dispute resolution instruments. This case serves as an important lesson that bilateral conflicts in Southeast Asia can escalate into regional threats, requiring more effective collective diplomatic coordination.

Keywords: Thailand, Cambodia, Preah Vihear Temple, regional security, ASEAN Way, regional diplomacy

PENDAHULUAN

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi regional di Kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok (Farida, 2014). Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik dan sosial diantara negara anggota (Muhammad, 2011). "To maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace building values in the Southeast Asia region". Artinya, ASEAN memiliki tujuan untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, stabilitas, serta memperkuat nilai-nilai pembangunan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menjadi fondasi penting bagi peran ASEAN di kawasan. Sehingga, ketika muncul potensi konflik antarnegara anggota yang berimplikasi terhadap keamanan kawasan, peran ASEAN sebagai mediator menjadi krusial.

Di tahun 2025, ASEAN kembali menghadapi gejolak, hal ini ditandai dengan konflik antara Thailand dan Kamboja yang kembali terjadi. Thailand dan Kamboja awalnya memiliki hubungan

yang baik dan jarang terlibat pertikaian satu sama lain namun hubungan itu mulai renggang pasca terjadinya Perang Indochina pada tahun 1975 (Nisa, 2016). Sengketa Kuil Preah Vihear bermula pada era kolonial, ketika Prancis menetapkan batas wilayah yang tidak tuntas antara Kamboja dan Siam (Thailand saat itu). Klaim tumpang tindih atas wilayah seluas 4,6 km² di sekitar kuil memicu ketegangan dan bentrokan militer. Kuil tersebut juga memiliki nilai historis dan simbolik bagi kedua negara sebagai lambang identitas nasional dan kebanggaan budaya, dan garis perbatasan yang kabur menciptakan zona abu-abu yang menjadi sumber utama sengketa.

Konflik perbatasan terkait klaim atas kawasan Kuil Preah Vihear menjadi isu keamanan kawasan yang menantang stabilitas Asia Tenggara (Pottu & Siahaan, 2021). Eskalasi meningkat ketika UNESCO menetapkan Kuil Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia pada 2008 sehingga sengketa yang awalnya bersifat bilateral juga mendapat perhatian internasional (Oktria, 2013). Situasi ini memicu tekanan politik bagi kedua pemerintah untuk bersikap tegas, karena opini publik dan kelompok nasionalis menuntut perlindungan kedaulatan negara. Konflik ini juga menjadi perhatian negara-negara tetangga dan lembaga internasional, yang menyoroti potensi gangguan terhadap stabilitas regional dan perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Ekskalasi konflik dipicu oleh isu historis, administratif, dan dinamika politik domestik. Pemerintah Thailand dan Kamboja terkadang memanfaatkan klaim wilayah untuk memperkuat legitimasi politik, terutama saat kondisi internal memerlukan dukungan nasionalisme. Misalnya, media dan kelompok kepentingan nasionalis di Thailand menggunakan sengketa Preah Vihear sebagai simbol kedaulatan, dan konflik menjadi alat retorika politik. Implikasi konflik ini bersifat bilateral dan berdampak terhadap keamanan kawasan serta efektivitas diplomasi ASEAN. Konflik tersebut menjadi ujian nyata bagi organisasi regional untuk menunjukkan kapasitasnya dalam manajemen konflik dan menjaga stabilitas kawasan.

Selain itu, konflik ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara isu historis, identitas nasional, dan kepentingan strategis. Kuil Preah Vihear bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga menjadi alat politik domestik untuk memobilisasi dukungan publik melalui nasionalisme. Kedua negara menggunakan sengketa ini untuk menegaskan kedaulatan dan legitimasi pemerintahan masing-masing yang pada gilirannya memperumit mekanisme penyelesaian damai yang diupayakan ASEAN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini kemudian bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu: bagaimana dinamika konflik Thailand–Kamboja dalam sengketa Kuil Preah Vihear, bagaimana perspektif keamanan kawasan dapat menjelaskan implikasi konflik terhadap stabilitas Asia Tenggara, serta bagaimana peran ASEAN melalui diplomasi regional dalam meredam konflik tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika konflik Thailand–Kamboja terkait sengketa Kuil Preah Vihear, menganalisis implikasi konflik terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara, dan mengkaji peran diplomasi regional ASEAN dalam penyelesaian konflik Thailand–Kamboja.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui *desk review* atas dokumen kebijakan dan literatur terkait konflik Thailand dan Kamboja. Pendekatan ini mengikuti kerangka tahapan yang jelas, sesuai dengan prosedur *desk review* yang telah dikembangkan oleh Barbieri et al. (2025). Melalui prosedur *desk review* yang sistematis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kebijakan penanggulangan perdagangan manusia di ASEAN, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya berdasarkan data yang terverifikasi dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Thailand–Kamboja dalam Sengketa Kuil Preah Vihear

Sengketa Kuil Preah Vihear berakar sejak era kolonial, ketika penarikan kekuasaan Prancis meninggalkan persoalan batas teritorial yang tidak tuntas. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 memutuskan bahwa kuil berada dalam kedaulatan Kamboja, batas

detail di sekitar kompleks candi tidak pernah ditetapkan dengan jelas sehingga tetap memicu klaim dan bentrokan (Pottu & Siahaan, 2021). Ketidakjelasan ini menjadi bahan bakar klaim teritorial oleh kedua negara sehingga memuncak menjadi bentrokan bersenjata pada periode 2008–2011 saat nasionalisme dan dinamika politik domestik memperkuat tekanan untuk mengambil posisi keras terhadap negara lawan (Naqsabandiyah, 2025). Sengketa dipahami sebagai pertarungan klaim teritorial yang sarat nilai simbolik dan legal (Pattinusa, 2021).

Pengakuan UNESCO atas Kuil Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia pada 2008 menjadi titik pemicu eskalasi baru. Status warisan budaya internasional ini memunculkan tekanan publik dan memperkuat sentimen nasionalisme, sehingga isu budaya berubah menjadi persoalan politik dan keamanan. Reaksi domestik pemerintah Thailand dan Kamboja semakin memperkuat potensi konflik bilateral (Aji, 2025). Dinamika konflik diperumit oleh politik dalam negeri: klaim wilayah sering dijadikan alat politik nasionalisme, memobilisasi dukungan publik, dan dijadikan simbol kebanggaan nasional. Dampaknya nyata pada ketegangan militer, patroli perbatasan, dan insiden kecil yang berpotensi memicu eskalasi lebih lanjut (Farida, 2014).

Selain itu, pada tahun 2013–2025, eskalasi militer kembali terjadi meskipun ICJ telah mengeluarkan keputusan final. Insiden perbatasan sering terjadi di zona abu-abu yang belum secara resmi dibatasi seperti di Phu Makhuea dan Ban Rom Khao yang menyebabkan peningkatan patroli militer dan bentrokan bersenjata kecil. Fenomena ini menunjukkan bahwa resolusi hukum internasional tidak selalu diterjemahkan secara efektif ke tindakan diplomasi atau keamanan di lapangan, sehingga peran ASEAN sebagai mediator regional menjadi semakin krusial.

Konflik yang berulang memiliki implikasi jangka panjang terhadap keamanan regional dan hubungan bilateral. Risiko eskalasi berulang dapat menimbulkan ketidakstabilan di kawasan perbatasan dan meningkatkan ketegangan militer. Konflik berkepanjangan juga berdampak pada hubungan ekonomi, termasuk perdagangan lintas batas dan investasi, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap keamanan regional. Ketidakpastian batas wilayah dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam di perbatasan, sehingga stabilitas politik dan ekonomi kawasan menjadi terpengaruh (Smith, 2020).

Implikasi Konflik terhadap Keamanan Kawasan Asia Tenggara

Konflik Kuil Preah menantang prinsip dasar keamanan regional ASEAN, yaitu stabilitas, non-intervensi, dan penyelesaian sengketa secara damai. Bentrokan militer di perbatasan 2008–2011 menunjukkan bahwa konflik bilateral berpotensi berkembang menjadi instabilitas kawasan, terutama karena kedekatan geografis dan keterhubungan ekonomi-politik antaranggota ASEAN. Hal ini menimbulkan dampak ekonomi yang nyata, seperti gangguan perdagangan lintas batas, penundaan proyek investasi, dan ketidakpastian dalam mobilitas tenaga kerja di wilayah perbatasan, yang semuanya dapat memperlemah integrasi ekonomi kawasan (Smith, 2020). Kekhawatiran pada sengketa serupa dapat melemahkan kredibilitas ASEAN sebagai organisasi keamanan kawasan (Pottu & Siahaan, 2021).

Selain itu, konflik tersebut juga memperlihatkan urgensi diplomasi regional dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Prinsip musyawarah dan konsensus (ASEAN Way) yang menjadi ciri khas ASEAN menghadapi tantangan besar. Menurut (Shofwan, 2006) Adapun beberapa prinsip-prinsip utama dalam pendekatan ASEAN Way diantaranya sebagai berikut.

1. **Pengutamaan Musyawarah dan Dialog Sebelum Mengambil Tindakan:** ASEAN menekankan pentingnya konsultasi dan dialog sebagai langkah awal dalam menyelesaikan perbedaan. Proses ini memungkinkan negara-negara anggota untuk saling memahami posisi masing-masing secara mendalam sebelum mengambil keputusan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai solusi yang diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan konfrontasi terbuka.
2. **Pencarian Konsensus Sebagai Dasar Keputusan Bersama:** Keputusan dalam ASEAN diambil melalui musyawarah untuk mufakat, memastikan bahwa semua negara anggota setuju dengan hasil yang dicapai. Meskipun proses ini dapat memakan waktu, pendekatan

konsensus dianggap efektif dalam menjaga keharmonisan dan solidaritas antar negara anggota.

3. Penghormatan terhadap Prinsip Non-Intervensi dalam Urusan Domestik Negara Anggota: Prinsip non-intervensi merupakan dasar dari hubungan antar negara anggota ASEAN. Setiap negara memiliki hak untuk mengelola urusan domestiknya tanpa campur tangan dari negara lain.
4. Penyelesaian Sengketa Secara Damai melalui Mekanisme Diplomatik: ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan dan sengketa antar negara anggota melalui cara damai, tanpa menggunakan ancaman atau kekuatan militer. Pendekatan ini tercermin dalam berbagai dokumen resmi ASEAN termasuk *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan militer.
5. Menjaga solidaritas dan citra ASEAN di mata internasional: Solidaritas antar negara anggota ASEAN merupakan kunci dalam menjaga stabilitas dan integritas kawasan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip bersama, ASEAN berupaya untuk tampil sebagai entitas yang kohesif di mata dunia internasional, meskipun terkadang menghadapi tantangan dalam mencapai kesepakatan bersama.

ASEAN Way ini dituntut untuk lebih proaktif dalam meredam konflik serta menjembatani kepentingan negara anggotanya (Sefriani, 2014). Pendekatan ini cenderung mengutamakan konsensus dan menghindari konfrontasi terbuka, ia tetap efektif dalam menjaga stabilitas kawasan melalui diplomasi yang inklusif dan dialog konstruktif (Caballero & Anthony, 2022). Konflik Kuil Preah Vihear menegaskan bahwa konflik bilateral yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas kawasan.

Dinamika konflik Preah Vihear memperlihatkan isu bilateral dapat berkembang menjadi persoalan regional. Keterlibatan berbagai aktor, baik negara anggota maupun lembaga internasional, menunjukkan bahwa sengketa semacam ini tidak bisa dianggap hanya sebagai urusan domestik atau hubungan dua negara semata. Keamanan kawasan Asia Tenggara bergantung pada kemampuan ASEAN menjaga keseimbangan antara prinsip non-intervensi dengan kebutuhan akan aksi kolektif dalam meredam ketegangan. Krisis ini menyoroti keterbatasan kapasitas ASEAN dalam menanggapi pelanggaran kesepakatan dan menegakkan mekanisme penyelesaian sengketa secara efektif. Krisis ini juga menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik dan militer di perbatasan dapat memengaruhi arus perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi regional secara signifikan sehingga stabilitas ekonomi-politik kawasan sangat terkait dengan manajemen konflik bilateral.

Peran Diplomasi Regional ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja

ASEAN mendorong Thailand dan Kamboja untuk menyelesaikan perselisihan melalui dialog, negosiasi, dan mediasi tanpa menggunakan kekerasan. Pendekatan ini sejalan dengan Piagam ASEAN dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan prinsip non-intervensi (Tjandra, 2016). ASEAN juga memfasilitasi pertemuan bilateral antara pejabat tinggi kedua negara, termasuk pertemuan menteri luar negeri, untuk membahas langkah-langkah konkret dalam meredakan ketegangan. Konflik ini menunjukkan pentingnya koordinasi multilateral untuk menghindari eskalasi, serta perlunya membangun mekanisme pencegahan konflik yang lebih sistematis. Dengan demikian, ASEAN tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

ASEAN juga mengimplementasikan pendekatan diplomasi shuttle melalui negara anggota yang menjabat sebagai ketua ASEAN saat itu, yakni Indonesia. Diplomasi shuttle dilakukan dengan mengirimkan perwakilan secara bergantian ke Thailand dan Kamboja untuk menyampaikan posisi, mencari titik temu, dan memantau implementasi gencatan senjata (Pattinusa, 2021). Untuk menengahi konflik antara Thailand Kamboja, Indonesia memfasilitasi berbagai pertemuan formal dan informal kedua negara tersebut secara ASEAN maupun bilateral serta trilateral (Pottu & Siahaan, 2021) diantaranya sebagai berikut.

1. Indonesia mempertemukan Thailand dan Kamboja di Jakarta: Salah satu langkah penting adalah pertemuan informal yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 Februari 2011. Pertemuan ini menghadirkan perwakilan dari kedua negara dalam suasana yang lebih fleksibel, sehingga memungkinkan kedua pihak menyampaikan posisi dan kekhawatiran mereka secara terbuka tanpa tekanan protokol yang ketat. Pertemuan informal ini berfungsi sebagai tahap awal untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan, yang merupakan fondasi penting sebelum melanjutkan ke dialog formal.
2. Pertemuan formal melalui kerangka Join Border Committee (JBC) di Bogor: Pertemuan ini membahas isu-isu spesifik terkait batas wilayah yang disengketakan dan prosedur implementasi gencatan senjata di perbatasan. JBC menyediakan forum resmi di mana data, peta, dan bukti historis dapat dikaji secara bersama sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan teknis yang lebih jelas dan mengurangi potensi kesalahpahaman di lapangan.
3. Pertemuan Trilateral disela-sela KTT ASEAN ke-18 di Jakarta: Pertemuan ini melibatkan Indonesia sebagai fasilitator pihak ketiga, serta Thailand dan Kamboja sebagai pihak yang bersengketa. Format trilateral ini memungkinkan ASEAN untuk secara langsung memantau perkembangan dialog, memberikan masukan, dan memastikan kedua negara tetap berada pada jalur diplomasi damai. Pendekatan trilateral ini juga memperkuat kredibilitas ASEAN sebagai mediator regional yang netral dan berkomitmen pada penyelesaian konflik secara damai.
4. Pertemuan formal Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM): Kedua negara didorong untuk menyepakati langkah-langkah jangka panjang dan kerangka kerja bersama yang dapat menghindari eskalasi lebih lanjut. AMM memberikan legitimasi politik yang kuat terhadap hasil perundingan, sekaligus menegaskan dukungan ASEAN terhadap penyelesaian sengketa melalui mekanisme regional, sesuai dengan prinsip Treaty of Amity and Cooperation (TAC)

Selain itu, peran diplomasi regional ASEAN tidak hanya terbatas pada fasilitasi pertemuan dan mediasi, tetapi juga mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi kesepakatan dan pembangunan kepercayaan antara Thailand dan Kamboja. ASEAN melalui mekanisme informal dan formalnya, menekankan pentingnya transparansi, komunikasi reguler, serta komitmen kedua negara terhadap resolusi damai yang telah disepakati. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada negosiasi satu kali, melainkan pada kontinuitas diplomasi, koordinasi regional, dan kesiapan semua pihak untuk menghormati prinsip-prinsip regional security yang menjadi landasan kerjasama ASEAN (Acharya, 2021).

KESIMPULAN

Sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja mencerminkan kompleksitas konflik kawasan yang berakar pada sejarah kolonial, identitas nasional, serta dinamika politik domestik. Putusan Mahkamah Internasional tahun 1962 tidak mampu meredam klaim teritorial karena batas wilayah yang kabur, sehingga bentrokan bersenjata berulang kali terjadi, terutama pasca penetapan kuil sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada 2008. Konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga menimbulkan implikasi serius bagi keamanan kawasan Asia Tenggara termasuk gangguan perdagangan lintas batas, ketidakpastian investasi, serta berkurangnya kepercayaan terhadap stabilitas regional.

Dalam konteks regional, ASEAN berperan penting sebagai mediator melalui diplomasi damai yang mengedepankan musyawarah, konsensus, dan non-intervensi. Melalui berbagai forum formal dan informal seperti pertemuan bilateral, trilateral, hingga koordinasi melalui menteri luar negeri ASEAN berupaya menjaga komunikasi, mengurangi eskalasi militer, serta membangun kepercayaan antar pihak. Namun, konflik ini juga menyoroti keterbatasan ASEAN dalam menegakkan resolusi yang bersifat mengikat, sehingga menunjukkan perlunya penguatan mekanisme diplomasi kolektif dan langkah preventif di masa depan. Pada akhirnya, kasus Preah Vihear menjadi pelajaran penting mengenai bagaimana konflik bilateral dapat berdampak pada stabilitas regional dan menguji kapasitas ASEAN dalam menjaga keamanan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. R. (2015). Konflik Perbatasan Thailand–Kamboja di Sekitar Kuil Preah Vihear. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 7(2), 101–118.
- Acharya, A. (2021). Constructing security communities. In *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.4324/9781315796673-14>
- Caballero, & Anthony, M. (2022). The ASEAN way and the changing security environment: navigating challenges to informality and centrality. *International Politics*. <https://doi.org/10.1057/s41311-022-00400-0>
- Farida, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand Dan Kamboja Melalui Mekanisme Asean. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1).
- Muhammad, S. V. (2011). Dinamika Perkembangan ASEAN Menuju A People Oriented Organization. *Kajian*, 16(3), 493–516. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/53>
- Naqsabandiyah, A. H. (2025). Revisiting ASEAN as Security Community: The Case of Thailand-Cambodia Longstanding Dispute. *Institute for Global and Strategic Studies*, 5(7), 1–4.
- Nisa, I. Y. (2016). Peran ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/25919/>
- Oktria, O. A. (2013). KEBIJAKAN PERDANA MENTERI YINGLUCK SHINAWATRA TERHADAP SENGKETA KUIL PREAH VIHEAR ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA.
- Pattinusa, J. M. Y. (2021). MENINJAU KEMBALI PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH ANTARA THAILAND-KAMBOJA (PEREBUTAN KUIL PREAH VIHEAR) [RETHINKING THE TERRITORIAL DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN THAILAND-CAMBODIA (CONQUEST FOR PREAH VIHEAR TEMPLE)]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 13(25). <https://doi.org/10.19166/verity.v13i25.4468>
- Pottu, O. Y., & Siahaan, C. (2021). Peran Asean Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humanior*, 03(04).
- Sefriani. (2014). Asean Way Dalam Perpektif Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10128>
- Shofwan, I. S. (2006). ASEAN Way sebagai manajemen konflik negara-negara Asia Tenggara. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
- Smith, J. (2020). Geopolitical Implications of Border Disputes in Southeast Asia. *Asian Security Studies*, 25(4), 112-130.
- Tjandra, W. (2016). Perkembangan Komunitas Keamanan ASEAN dalam Konflik Thailand-Kamboja. *Jurnal International & Diplomacy Universitas Satya Negara Indonesia*, 2(1).